

Eksil's Dilemma: Stay Abroad or Return to Indonesia

Dilema Eksil: Tetap di Luar Negeri atau Pulang ke Tanah Air

Suradi¹, Safrudiningsih², Sjailendra³

suradi2001@gmail.com

[safrudiningsih@gmail.com](mailto:sufrudiningsih@gmail.com)

sjailendra@atvi.ac.id

Akademi Televisi Indonesia (Program Studi Komunikasi Massa)

Abstraks:

The September 30, 1965, Movement has had lasting impacts until today. One significant group affected is Indonesian nationals living abroad, especially students who were sent by Bung Karno to Eastern Europe for work or specific assignments. Many of them have been unable to return to their homeland and are referred to as exiles." On June 27, 2023, President Jokowi launched a program for Non-Judicial settlement of serious human rights violations, including victims of 1965 like the Eksil. President Jokowi also sent the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs to meet with the Eksil in Europe and offer them the opportunity to return to Indonesia. This has posed a new dilemma for the Eksil: whether to stay abroad or return to their homeland. The research aimed to explore this matter using qualitative methods, including literature, online media content, and interviews. The research findings reveal diverse responses among the Eksil towards President Jokowi's policy, with some expressing happiness to return while many others decline due to reasons such as age and establishing a new life abroad.

Keywords: Eksil, Movement of September 30, 1965; Sukarno, Settlement of Human Rights

Abstrak:

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 berdampak hingga saat ini. Salah satu yang sangat dirasakan adalah oleh orang Indonesia yang berada di luar negeri, terutama mahasiswa yang dikirim Bung Karno ke Eropa Timur, mereka bekerja, atau melakukan tugas tertentu. Banyak di antara mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air. Mereka yang terhalang pulang ini disebut 'Eksil'. Pada 27 Juni 2023 Presiden Jokowi meluncurkan program penyelesaian HAM berat Non Yudisial, termasuk korban 1965 seperti Eksil. Presiden Jokowi juga mengutus Menkopolkam untuk mendatangi para Eksil di Eropa dan menawarkan untuk pulang ke Indonesia. Para Eksil saat ini menghadapi dilema baru: tetap di luar negeri atau pulang ke tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap soal ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penggunaan literatur, tayangan media online, dan wawancara. Hasil penelitian, respon para Eksil terhadap kebijakan Presiden Jokowi beragam, ada yang senang ingin pulang, sementara banyak yang menolak karena alasan usia dan kehidupan baru di luar negeri.

Kata Kunci : Eksil, Gerakan 30 September 1965, Sukarno, Penyelesaian HAM

1. Pendahuluan

Dalam sebuah keterangan pers di Istana Negara pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya telah membaca secara saksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden mengungkapkan ada 12 pelanggaran Haka Azasi Manusia (HAM) kategori berat yang diakui, urutan pertama Peristiwa 1965-1966, ada juga peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230111104824-12-898847/daftar-12-kasus-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-jokowi>)

Sekitar lima bulan kemudian, Presiden Jokowi meluncurkan apa yang disebutnya program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat di Tanah Air. Peluncuran program tersebut diselenggarakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh pada Selasa, 27 Juni 2023. Alasan pemilihan tempat peluncuran tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh, serta penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami yang terjadi pada tahun 2004. (<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/luncurkan-program-pemulihan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-presiden-untuk-pulihkan-luka-bangsa/>)

Dalam acara peluncuran program Pemerintah tersebut, hadir dua warga negara Indonesia (WNI) yang kini menjadi warga negara Rusia yaitu Sudaryanto Priyono dan Suryo Hartono yang sudah menjadi warga negara Republik Ceko. Keduanya menceritakan di hadapan Presiden Jokowi, tak bisa pulang ke Tanah Air, padahal Sudaryanto Priyono tengah studi di salah satu universitas di Moskow, Rusia dan Suryo Martono tengah kuliah di salah satu niversitas di Ceko. Baik Sudaryanto maupun Suryo berangkat studi melalui beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Keduanya tak lolos *screening* KBRI, karena menolak mengutuk Bung Karno dalam Peristiwa 1965, lalu paspor keduanya dicabut. (<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/19142491/kepada-jokowi-dua-eksil-peristiwa-1965-ceritakan-pengalaman-saat-tak-bisa>)

Banyak mahasiswa yang terhalang pulang hanya tak mau mengutuk Presiden Sukarno.



Gambar 1: Peluncuran program tersebut diselenggarakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh pada Selasa, 27 Juni 2023
Sumber: *Google*

Penulis berkesempatan mewawancarai dua perempuan eksil yang nasibnya sama dengan Sudaryanto Priyono dan Suryo Hartono dan kini tinggal di Belanda yaitu Ibu Nani Pardede dan Ibu Farida Isharyana melalui sambungan telepon dan berlanjut dengan wawancara tertulis. Baik Nani maupun Farida dikirim Presiden Sukarno melalui beasiswa pendidikan untuk melanjutkan studi. Nani dikirim ke Moskow, Rusia, dan Farida melanjutkan riset di Vietnam.

Sebenarnya penulis sudah berjanji bertemu langsung dengan Ibu Nani Pardede di suatu tempat di Amsterdam pada awal September 2022, saat penulis tengah mengadakan perjalanan ke Eropa, namun ketika hari yang sudah dijanjikan, yang bersangkutan terkena musibah, jatuh dari tangga apartemen, meski tidak luka parah, tapi rasa sakitnya membuat pertemuan untuk wawancara menjadi batal.

Jauh sebelumnya pada tahun 2004, penulis bertemu dengan eksil lain yang berlatang politik/ideologi yaitu Umar Said. Wartawan yang juga pengurus Persatuan Wartawan Asia ini terhalang pulang ketika sedang di Aljazair, persiapan Kongres Wartawan Asia-Afrika, awal September 1965 .

Kedatangan Umar Said di Jakarta pada 2004 untuk mengikuti peluncuran buku tentang dirinya, berjudul *Perjalanan Hidup Saya* yang kami terbitkan bersama beberapa teman di bawah nama Penerbit Pancur Siwah, 2004. Peluncuran buku yang diselenggarakan di Komnitas Utan Kayu, Jakarta Timur, juga dihadiri wartawan senior Rosihan Anwar, yang juga memberi pengantar dalam buku tersebut, meskipun secara ideologis keduanya berbeda. Umumnya orang menyebut Rosihan sebagai wartawan yang beraliran nasionalis dan Umar Said lebih ke sosialis. Selama terhalang pulang, Umar Said yang punya nama lain Andre Aumar, mendirikan Restoran Indonesia di Paris bersama beberapa rekan yang mengalami nasib serupa dengannya.

Dengan pengalaman pribadi penulis yang pernah bersentuhan langsung dengan eksil dan juga kini masih menjalin hubungan akrab dengan dua perempuan eksil di Amsterdam, Belanda, kebijakan baru Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan HAM berat, termasuk masalah eksil, serta minat yang cukup tinggi terhadap persoalan historis, politis, dan kemanusiaan, maka tema soal eksil ini penulis ulas.

Adapun ulasan jurnal ini akan berkisar pada persoalan psikologi yang dihadapi para eksil saat ini. Di satu sisi perubahan politik di Tanah Air, khususnya sejak masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurachman Wahid (Gus Dur) telah mengubah citra dan persepsi para eksil dan membuka pintu seluas-luasnya bagi para eksil untuk pulang. Situasi yang makin kondusif dan akan diikuti dengan aksi nyata yaitu *launching* program penyelesaian HAM berat non yudisial, termasuk eksil. Namun di sisi lain, para eksil menghadapi dilema berat dengan kenyataan hidup yang makin berat, khususnya usia yang tergolong tua kondisi kesehatan yang pasti menurun, serta istri-suami, anak dan cucu yang sudah nyaman tinggal di luar negeri. Paling tidak, kehidupan mereka di luar relatif nyaman, sedangkan jika pindah ke Indonesia, pasti harus memulai 'hidup baru'.

Mengingat Peristiwa Gerakan 30 September 1965 sudah berlangsung 57 tahun lalu dan usia eksil saat itu kisaran 20-tahun, maka para eksil yang masih hidup rata-rata berumur hampir 80 tahun dan ada yang lebih. Pertanyaannya, berapa jumlah eksil yang tersebar di sejumlah negara itu? Hasil penelitian Arie Junaedi untuk disertasi di UNPAD Bandung 2010 menyebutkan, jumlah eksil saat itu sekitar 1500 orang. Sebelum meletus G30S, mereka dikirim untuk studi ke sejumlah negara blok Komunis seperti Uni Soviet, Cekoslowakia, Polandia, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Bulgaria, serta Kuba, termasuk ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kini mereka menyebar ke negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Swedia, Rusia, dan Belanda. (Lihat Tesis Arie Junaedi, Transformasi Identitas dan Pola Komunikasi Para Pelarian Politik Tragedi 1965 di Swedia, Perancis, Jerman, dan Belanda, UNPAD, Bandung 2010).

Namun ketika Presiden Jokowi meluncurkan program penyelesaian HAM berat non yudisial, Juni 2023, jumlah eksil menyusut jauh, mereka sudah pergi meninggalkan kita semua karena usia dan sakit. Menurut Menkopohuman Machfud MD yang ditugaskan untuk mendatangi negara tempat eksil tinggal, jumlah mereka saat ini sekitar 136 orang. Menurutnya, 134 orang merupakan korban dari Peristiwa G30S 1965. Sebanyak 67 atau mayoritas korban tersebut ada di Belanda. Adapun, korban yang berada di Rusia hanya seorang, namun keturunannya telah mencapai 37 orang. Selain itu, sebanyak 14 orang tinggal

di Ceko, 8 orang di Swedia, 2 orang korban dan satu keturunannya di Slovenia, dan 2 orang di Malaysia. Sementara itu, di Albania, Bulgaria, Suriah, Inggris, Jerman tinggal masing-masing seorang korban 1965. Mahfud, MD menjelaskan seluruh korban 1965 yang ada di luar negeri merupakan hasil dari kebijakan diskriminatif. (<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/649584449d992/136-korban-ham-berat-masih-berada-di-luar-negeri-mayoritas-eksil-1965>).

Dengan adanya komitmen baru pemerintah mengenai penanganan korban pelanggaran HAM berat, termasuk eksil, penulis ingin merumuskan persoalan, bagaimana respon para eksil itu? Apakah akan mengikuti dan memenuhi saran pemerintah untuk kembali ke Tanah Air, tinggal di Indonesia, dan menjadi WNI atau warga negara Indonesia kembali.

Tawaran tulus Pemerintahan Jokowi ini rupanya direspon beragam oleh sejumlah eksil. Ada yang menyambut baik dan berusaha untuk meyakinkan dirinya serta keluarganya untuk kembali ke Tanah Air, dan sebaliknya banyak yang menilai sebagai komitmen yang bagus, tetapi untuk kembali pulang ke Tanah Air, apalagi meninggalkan kewarganegaraan yang kini sudah diraih dan sudah hidup nyaman di rantau, menjadi persoalan lain. Sejumlah eksil mengatakan mereka sudah tua dan tidak dalam kondisi fit serta sudah punya keturunan. Artinya sulit untuk pindah negara, meski itu negara yang amat dicintainya, Indonesia. Dilema batin para eksil inilah yang berusaha diungkap di dalam tulisan ini, berdasarkan cerita, dan kisah mereka yang sudah dimuat di media *online*, buku, dan, wawancara yang penulis lakukan.

1. Kajian Teori

Eksil atau éksil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak berada dalam negara atau rumah sendiri; atau arti kedua, orang yang berada di luar negaranya karena terpaksa atau pilihan sendiri. Sedangkan asal usul kata eksil itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris *exile* yang berarti terasing, atau dipaksa meninggalkan kampung halaman atau rumahnya.

Dalam perkembangan wacana eksil di Indonesia, mereka yang tidak bisa pulang atau terhalang pulang biasanya dikaitkan dengan stigma politik masa Orde Baru, yang dipicu Peristiwa G30S. Meski demikian, di luar stigma politik itu ribuan orang yang masuk kategori eksil sebenarnya mereka yang dikirim Pemerintah di bawah Presiden Sukarno untuk studi di berbagai negara, khususnya di Eropa Timur dalam berbagai bidang keilmuan, tujuannya untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dalam bidang iptek.

Setelah puluhan tahun para eksil terhalang pulang, dan kehidupan mereka jarang diungkap media, istilah eksil muncul kembali dan menjadi perbincangan publik setelah Presiden Jokowi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat.

Presiden Jokowi seolah mengingatkan kita dan khususnya eksil yang masih tersisa akan simpati dan janji Presiden KH Abdurachman Wahid atau Gusdur untuk memulangkan para eksil yang tersebar di Eropa dan sebagian kecil di Asia. Ketika itu Gus Dur mengutus Meteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menindaklanjuti masalah ini, sayang belakangan, upaya ini tidak berlanjut, hingga muncul kebijakan baru Presiden Jokowi.

Arten Aleida yang dikenal sebagai jurnalis dan juga sastrawan dalam pengantar bukunya tentang pengalaman dan kisah 19 eksil berjudul *Tanah Air Yang Hilang : Wawancara Dengan Orang-orang "Klayaban"* di Eropa (Penerbit Kompas, 2017, 325 halaman) mengatakan, eksil atau mereka yang lenyap tanah airnya, oleh Gus Dur disebut orang-orang "klayaban" yang mengembara di berbagai negara Eropa Barat. Mereka bukan yang menerima paspor dengan kemegahan, melainkan orang-orang yang haknya atas sebuah tanah air telah dirampas. Mereka berkelana menyeberangi berbagai batas negara dalam ketakutan, tanpa paspor, untuk menghindari pengejaran yang dilancarkan oleh sebuah rezim yang bertakhta berdasawarsa lama.

Langkah dan kebijakan politik Gus Dur ini oleh sejarawan yang kerap membedah soal G30S yakni Asvi Warman Adam, sebagai Pahlawan HAM. Asvi mengatakan, untuk mewujudkan kesetaraan antar sesama warga negara, Gus Dur memiliki komitmen amat tinggi. (<http://lipi.go.id/berita/gus-dur-pahlawan-ham/642>).

Ketika membahas masalah eksil, konsep dan teori tentang eksil dari Edward Said, pemikir dan juga penulis produktif yang kerap menyoroti bidang pemikiran pasca kolonialisme. Salah satu buku yang sering dikutip mengenai hal ini adalah karya Rehnuma Sazzad's "*Edward Said and the Concept Of Exile. Identity And Cultural Migration In The Middle East*" yang terbit 2017 yang intinya mengulas bagaimana seseorang kehilangan tanah air karena berbeda pemikiran dengan rezim penguasa di negara.

Dosen Senior Departemen Bahasa dan Kebudayaan, SOAS *University of London*, Soe Tjen Marching, dalam buku terbarunya juga menulis, siapa saja yang mengidentifikasi diri mereka sebagai eksil? Eksil politik menurut Edward Said dan Hannah Arendt adalah mereka yang kehilangan tanah air, terasing dan tak mempunyai tanah berpijak. Eksil terputus dari akar mereka, tanah mereka, sejarah mereka. Secara umum, eksil politik diartikan sebagai mereka-

mereka yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka, dan tak mungkin lagi kembali (*Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman*, EA Books, 2023 halaman 17)

Prof David T. Hill AM, Profesor Emeritus UNTUK Studi *Asia Tenggara di Universitas Murdoch* yang juga pendiri dan Direktur ACICIS (*the Australian Consortium for 'In-Country Indonesian' Studies*), menulis makalah menarik terkait eksil. Hill menyimpulkan bahwa eksil adalah komunitas retak atau terpecah. Mereka tidak dapat berbicara dengan satu suara bahkan saat mereka berjuang untuk menemukan suaka dan keamanan.

Namun demikian, para eksil di tanah pengasingan ternyata banyak yang menghasilkan karya seperti otobiografi, novel (dalam bahasa Inggris dan Indonesia), majalah dan jurnal, puisi dan drama, antologi, koleksi cerita pendek, dan esai. Artinya, karya-karya tersebut dapat menjadi media bagi eksil untuk bersuara. (<https://researchportal.murdoch.edu.au/esploro/outputs/conferencePaper/Knowing-Indonesia-from-Afar-Indonesian-Exiles/991005542804307891#file-0>)

David Hill memulai makalahnya dengan memaparkan sedikit peristiwa pengasingan yang dilakukan di jaman kolonial atau masa Pemerintahan Hindia Belanda dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai strategi eksil yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru. Ternyata aspek sejarah eksil cukup di Tanah Air, selain David Hill yang menyinggung sedikit, sejarawan Hilmar Farid yang kini menjabat Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid mengulas panjang lebar soal sejarah eksil di Indonesia. Dalam artikel di web pribadinya berjudul "Pengasingan dalam Politik Indonesia" menguraikan bagaimana sejumlah tokoh politik diasingkan oleh Pemerintah Kolonial ke sejumlah daerah, termasuk ke Boven Digul, Papua dengan tujuan menghindari mereka dari para pengikut atau rakyat. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim pernah diasingkan.

Tokoh yang dikenal sebagai 'Tiga Serangkai' yakni Tjipto Mangunkusumo, Doewes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat bahkan diasingkan ke Belanda tahun 1913, karena ketiganya gencar memprotes rencana Pemerintah Kolonial memperingati secara besar-besaran Kemerdekaan Negeri Belanda dari Prancis. Semua kebijakan pengasingan itu didasarkan atas kekuasaan Gubernur Jenderal menggunakan hak yang disebut *exorbitante rechten* untuk menindak pergerakan nasional.

Hilmar menyebutkan, pola penggunaan hak untuk menindas pergerakan ini dilakukan juga oleh Pemerintah Orde Baru. Kekuasaan *exorbitante rechten* ini waktu itu berada di tangan Kopkamtib kemudian Bakorstanas yang biasa menangkap, menahan, dan mengasingkan orang tanpa pengadilan. Jenderal Soeharto sebagai pemimpin tertinggi Kopkamtib kedudukan dan

fungsinya mirip dengan Gubernur Jenderal dalam menangani keamanan dan keselamatan negeri. (<https://hilmarfarid.id/pengasingan-dalam-politik-kolonial/>)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik penggunaan literature, tayangan media online, dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan eksil yang tinggal di Prancis, Umar Said, ketika yang bersangkutan berada di Jakarta tahun 2004 dalam rangka peluncuran buku beliau *Perjalanan Hidup Saya* yang diterbitkan Yayasan Pancur Siwah, 2004

Selain itu penulis melakukan wawancara tertulis dengan dua orang eksil yang tinggal di Amsterdam, Belanda yaitu Farida Ishaja dan Nani Pardede. Di samping itu penulis mengikuti bedah buku berjudul *Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman*, pada Minggu 19 April 2023 yang menghadirkan penulis, eksil, penulis buku eksil, dan mahasiswa KU Leuven, Brussel, Belgia.

3. Hasil dan Pembahasan

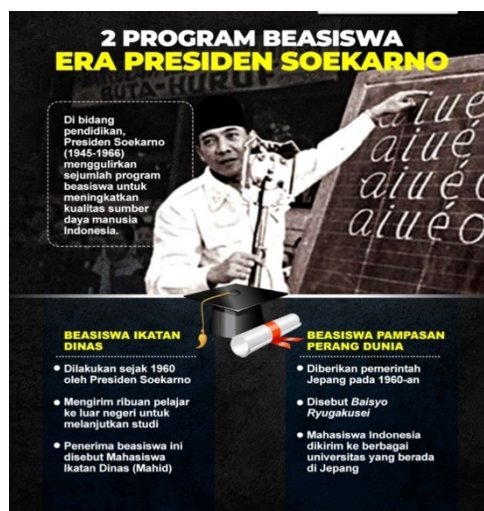
Setelah Indonesia merdeka, kepemimpinan Presiden Sukarno-Hatta memiliki visi masa depan membangun bangsa dengan kekuatan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu kerja sama dengan berbagai negara maju mutlak dilakukan, dan langkah pertama adalah membuka misi diplomatik yang dilakukan selama tahun 1950an.

Mengutip Supartono, A. & Lisabona, R. (2001). “Studi Indonesia di Rusia: Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa Disinggahi”, *Kompas*, 6 Juli, 2001, Wahyudi Akmaliah dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI) menulis artikel ilmiah yang menarik di *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 1 Tahun 2015* berjudul “Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 dan Kemunculan Eksil Indonesia”

Pada masa ini Presiden Sukarno melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, RRC (Republik Rakyat China), Jepang, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Hasil dari kunjungan tersebut adalah banyaknya putera-puteri Indonesia yang dikirim belajar keluar negeri. Misalnya, kunjungan pertama Sukarno ke Uni Soviet tahun 1956 menghasilkan pengiriman tujuh mahasiswa pertama ke Moskow. Hasil dari kunjungan balasan Nikita S. Khrushchev, Sekretaris Jenderal Pertama Partai Komunis Soviet Bersatu dan Perdana

Menteri Uni Soviet, dibukanya kesempatan beasiswa kepada masyarakat Indonesia pada Februari-Maret 1960.

Sejak tahun 1960, banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim belajar ke Uni Soviet. Perjanjian antar organisasi massa, partai, dan institusi lain termasuk militer, menambah jumlah orang Indonesia yang dikirim belajar. Jumlah seluruhnya sekitar 2.000 orang. ([file:///C:/Users/08/Downloads/122-Article%20Text-235-1-10-20150921%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/08/Downloads/122-Article%20Text-235-1-10-20150921%20(6).pdf))



Gambar 2: Program Bea Siswa Era Presiden Soekarno

Sumber: <https://infografis.okezone.com/detail/775560/2-program-beasiswa-era-presiden-soekarno>

Dengan semangat luar biasa untuk menghasilkan talenta berbagai bidang, Pemerintah kala itu menggulirkan program beasiswa, meskipun keadaan ekonomi dan keuangan negara masih lemah. Salah satu beasiswa yang digulirkan saat itu antara lain Beasiswa Ikatan Dinas yang mahasiswanya disebut Mahasiswa Ikatan Dinas atau Mahid serta beasiswa Duta Ampere yang pesertanya calon pegawai negeri sipil. Program Beasiswa Ikatan Dinas dilakukan sejak 1960 sampai 1965 dengan mengirim ribuan pelajar ke negara Blok Timur seperti Rusia, Ceko, dan negara lainnya. Program beasiswa ini berakhir saat peralihan ke Orde Baru karena peristiwa G30 S PKI.

Beasiswa lainnya adalah beasiswa Pampasan Perang Dunia atau Baisyo Ryugakusei. Dana beasiswa ini berasal dari Pemerintah Jepang. Beasiswa ini diberikan pemerintah Jepang pada 1960-an. Ketika itu, mahasiswa Indonesia dikirim ke berbagai universitas yang berada di Jepang. (<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/sejarah-beasiswa-di-indonesia-masa-indonesia-merdeka-sekarang/>)

Para mahasiswa yang tengah belajar di luar negeri itulah yang kemudian terdampak peristiwa politik di Tanah Air – G30 S/PKI- yang sesungguhnya tidak ada hubungannya

dengan apa yang mereka tengah lakukan di luar negeri yaitu mendalami studi sesuai bidang yang dipilih. Mereka terhalang pulang, kemudian menjalani masa-masa sulit dan getir hingga menua di luar negeri. Mereka menjadi eksil, atau kata Gus Dur menjadi orang *klayaban*.

Di samping para mahasiswa dan pegawai negeri yang mengikuti program beasiswa di berbagai negara, sejumlah orang Indonesia yang tengah melakukan perjalanan ke luar negeri karena urusan dinas, profesi atau keperluan lain, terdampak juga. Mereka pun terhalang pulang, terutama yang tak lolos pemeriksaan di KBRI tempat negara yang sedang mereka kunjungi. Misalnya Umar Said yang akhirnya mendapat suaka di Prancis dan kemudian dikenal sebagai salah satu pendiri Restoran Indonesia di Paris.

Pada awal Oktober 1965 Umar Said mendengar dari KBRI di Alger bahwa terjadi G30S. Karena kemudian mendengar bahwa surat kabar *Ekonomi Nasional* bersama-sama *Harian Rakyat*, *Wartabhakti*, *Bintang Timur*, *Suluh Indonesia* dilarang terbit, dia memutuskan untuk tidak segera kembali ke Jakarta, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Setelah menunggu agak lama di Alger dan di Paris, hingga November 1965 memutuskan untuk menggabungkan diri dengan delegasi Indonesia yang sedang berkunjung ke Tiongkok dalam rangka Hari Nasional Tiongkok 1 Oktober. Setelah ini Umar Said tak bisa kembali lagi. (<https://umarsaid.gitlab.io/biography/>).

Kisah dan perjalanan serta catatan tentang pengalaman seorang wartawan Indonesia, yang bisa dikategorikan “luar biasa.” Ini diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Perjalanan Hidup Saya* (Penerbit: Pancur Siwah, 2004, tebal: 298 halaman). Indonesia yang dibayangkan Sukarno, Hatta, dan para pendiri bangsa ini, juga harapan membangun negeri dari para pemuda dan mahasiswa yang dikirim ke luar negeri seakan pupus dengan meletusnya Peristiwa G-30 S pada akhir September 1965. Tidak lama setelah itu terjadi pergantian kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto. Dan menjelang G-30 S serta sesudahnya, berdampak luas hingga saat ini adalah terjadi pertumpahan darah. Ribuan orang meninggal dalam aksi kekerasan baik yang dilakukan oleh unsur PKI maupun sebaliknya, ketika pimpinan dan kader PKI dikejar dan dibunuh. Tulisan ini tidak membahas soal G-30 S, tetapi peristiwa ini sebagai pemicu perubahan politik, termasuk perubahan kebijakan pemerintah baru terhadap orang Indonesia di luar negeri yang akhirnya menimbulkan apa yang kita sebut eksil ini.



Gambar 3: Presiden Soekarno Mengumumkan Supersemar
Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>

Salah satu kebijakan yang ditujukan langsung pada orang Indonesia ataupun mahasiswa yang tengah menempuh studi di luar negeri dan berujung munculnya eksil adalah pemeriksaan seluruh warga negara Indonesia melalui KBRI masing-masing. Pada 7 Mei 1966, diwakili Menteri Pendidikan Indonesia, Mashuri Saleh, Suharto mengeluarkan instruksi kepada mahasiswa Indonesia, intelektual publik, dan budayawan yang sedang melakukan kunjungan di luar negeri untuk menjalani *screening* atau pemeriksaan dan pernyataan loyalitas terhadap kepada pemerintah baru, yaitu Orde Baru di bawah Suharto. Metode pemeriksaan ini diumumkan Menteri Luar Negeri, ketika itu Menlu *ad interim*, Adam Malik. Jika menolak, mereka hanya mendapatkan stempel ijin sekali pulang ke Indonesia. Akibatnya, jika menolak memberikan paspor atau masanya sudah habis, mereka tidak dapat kembali ke Indonesia dan kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

Karena ketidaktahuan sistem baru ini dan juga upaya untuk menuntaskan studi mereka sampai selesai telah mengakibatkan orang Indonesia di luar negeri kehilangan kewarganegaraan mereka. Meskipun, banyak juga, karena sikap politik yang berpihak kepada Sukarno dan menjadi pengurus PKI luar negeri, mereka menolak pemeriksaan tersebut. Alasan penolakan tersebut adalah karena Orde Baru telah melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah (*Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 1 Tahun 2015*).

Terhadap kebijakan baru Suharto itu banyak ditolak mahasiswa Indonesia yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di sejumlah negara. Nani Pardede, salah seorang eksil yang kini tinggal di Amsterdam, dalam wawancara dengan penulis 25 November 2022 mengatakan, dirinya memang disodorkan sejumlah pertanyaan saat mendatangi KBRI Moskow saat itu. “Saya menolak menjawab dan saya juga menyatakan tetap setia pada Bung Karno. Sebab Presiden Sukarno yang mengirim saya dan juga sejumlah mahasiswa ke Moskow dan negara lain untuk menuntut ilmu. Saya tahu konsekuensinya bila menolak yakni paspor saya dicabut

dan saya kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketika itu saya tak banyak tahu peristiwa di Tanah Air terkait G30 S. Setahu saya Presiden Sukarno yang masih berkuasa. Nani yang kuliah di bidang sastra dan budaya Rusia dan kemudian menikah dengan orang Rusia.

Salah satu eksil lagi yang penulis wawancara bernama Farida Ishaja. Pada tahun 1964, ia dikirim ke Vietnam dan mempelajari bidang sejarah. Selama 12 tahun Farida berada di Vietnam dan pengalaman yang tak terlupakan adalah karena situasi perang di negara tersebut, sehingga kuliah atau belajar berpindah pindah, dari ruang kelas, ke pedalaman, dan sempat sembunyi di lubang persembunyian guna menghindari bom. Cerita soal bom dan lubang persembunyian dapat dibaca di buku Marten Aleida, *Tanah Air yang Hilang* hal 143, Farida yang kemudian tinggal di Amsterdam, kepada penulis pada mengungkapkan, dirinya menolak untuk menjawab semua pertanyaan dalam pemeriksaan dan tetap mengakui atau loyal terhadap Sukarno, bukan Suharto. Akibatnya, paspornya pun dicabut dan hilang kewarganegaraan Indonesiannya.

Baik Nani maupun Farida kerap mengirimkan pesan kepada penulis dan selalu mengucapkan rasa syukur yang luar biasa mengingat di masa tuanya, relatif dapat hidup layak di Amsterdam, dan aktif di perkumpulan orang Indonesia di sana. Soal pulang dan kembali ke Tanah Air, nampaknya mustahil, mereka akan tetap tinggal di sana hingga akhir hayat. Tapi beberapa kali sempat mengunjungi Indonesia ketika situasi sudah aman.

Farida menceritakan, kunjungan pertama ke Indonesia, 1994 dan kunjungan ke 2 di masa reformasi. Waktu diisi dengan ziarah ke makam-makam keluarga dan kunjungan silaturahmi ke keluarga kedua belah pihak. Dari Banten, Lampung Tengah, Jabar, Jateng dan Jatim.



Gambar 4: Nani Pardede dan Farida Ishaja (berkerudung)
Sumber: Foto koleksi Farida

Suami saya melakukan kunjungan ke 3 di tahun 1999 ke Indonesia mengantarkan barang-barang amanah almarhum ayah angkatnya di Amsterdam untuk keluarga di Indonesia, sekaligus suami membawa Masnya/ipar saya berkunjung ke para keluarga di Jawa Timur antara lain di Surabaya, Kediri, Malang, Jember dan terus ke teman di Bali. Wartawan dan pendiri Restoran Indonesia di Prancis, Umar Said (26 Oktober 1926-7 Oktober 2011), ketika bertemu penulis di Jakarta tahun 2004 menceritakan kisahnya yang berujung terdampar di Perancis. Pria kelahiran Pakis, Malang, Jawa Timur, 26 Oktober 1926 mengaku ikut berjuang melawan penjajahan Belanda dalam Pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya ini, ketika terjadi Peristiwa G-30 S, baru saja tiba di Aljazair dalam rangka persiapan Kongres Wartawan Asia-Afrika ke-2. Sejak peristiwa itu Ia terhalang pulang ke Tanah Air dan menjadi eksil selama puluhan tahun.

Setelah mendapat suaka di Prancis tahun 1974, ia bermukim di Paris. Ia bekerja, membangun usaha resto, dan tentunya menulis di website pribadinya <http://umarsaid.free.fr/>. Situs tersebut terakhir memuat tulisan di Paris pada 7 September 2011. (Baca:Umar Said, *Perjalanan Hidup Saya*). “Jakarta sudah berubah jauh, sudah sangat maju dan makin padat penduduknya. Maklum sudah hamper 40 tahun saya tidak melihat langsung Ibu Kota. Luar biasa sekali, saya dapat menikmati perubahan ini dan merasakan kemajuan masyarakat. Sekarang saya ingin menikmati makanan yang enak, termasuk masakan Sunda ini,” ujar Umar Said ketika kami ajak makan di “Dapur Sunda” di kawasan Fatmawati tahun 2004.

Bagaimana pedih dan perihnya hidup sebagai eksil, dapat dibaca di buku riwayat Umar Said, *Perjalanan Hidup Saya*. Pada Bab 5, dengan judul “Menjadi Orang Kelayaban” (hal. 123-126) dan Bab 6, “Persiapan-persiapan MeninggalkanTiongkok (hal.127-130), Umar Said menulis, saya hidup di Tiongkok selama 7 tahun, mulai akhir 1965 sampai permulaan 1973. Dan Tiongkok saya tinggalkan ketika Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP) belum selesai. Secara pokok kehidupan saya adalah di Persatuan Wartawan Asia-Afrika (PWAA). Ketika seluruh Tiongkok mengalami kekacauan dan berbagai peristiwa dalam rangka RBKP, maka sebagai tamu asing kami mendapat ‘pelayanan khusus’ alias pembatasan.

Selama di Tiongkok Umar Said pernah ikut mengalami hidup di pedesaan, bersama-sama teman Indonesia lainnya. Dalam rangka RBKP, waktu itu dianjurkan kepada kaum intelektual untuk belajar kerja kasar atau “kerja badan.” Dalam keterbatasan kehidupan di desa yang sedang tenggelam dalam suasana RBKP itu kami ciptakan sendiri berbagai kegiatan lainnya. “Dalam suasana begini inilah dalam tahun 1973 saya diminta oleh sejumlah teman-teman untuk mempelajari kemungkinankemungkinan atau mencari jalan dan mengadakan

persiapanpersiapan, bagi mereka yang ingin pulang ke Tanah Air atau keluar dari Tiongkok, dengan berbagai cara, termasuk memalsukan cap KBRI untu paspor agar nanti bisa keluar Peking dan leluasa ke Eropa. Untuk ini kami harus membikin stempel palsu KBRI dan mengarang nama petugas yang memperpanjangnya,”



Gambar 5: Cover buku Umar Said, *Perjalanan Hidup Saya* (Penerbit Pancur Siwah, 2004)
Sumber: Google

“Dalam suasana begini inilah dalam tahun 1973 saya diminta oleh sejumlah teman-teman untuk mempelajari kemungkinan kemungkinan atau mencari jalan dan mengadakan persiapan persiapan, bagi mereka yang ingin pulang ke tanah air atau keluar dari Tiongkok, dengan berbagai cara, termasuk memalsukan cap KBRI untu paspor agar nanti bisa keluar Peking dan leluasa ke Eropa. Untuk ini kami harus membikin stempel palsu KBRI dan mengarang nama petugas yang memperpanjangnya,”

Dengan stempel palsu KBRI (yang dibikin sendiri) itulah paspor Indonesia Umar Said diperpanjang batas waktunya. Dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kemungkinan tentang adanya peluang untuk ke luar dari Tiongkok atau pulang ke tanah air itu saya pergi ke berbagai negeri di Eropa: Perancis, Itali, Swiss, Jerman Barat, Yugoslavia.

Dari pengalaman berkeliling ini dia mengetahui bahwa bepergian dengan menggunakan paspor Indonesia yang “diperpanjang sendiri” adalah mungkin. Karena, petugas-petugas imigrasi di berbagai negeri tidak tahu apakah cap yang ada dalam paspor itu palsu atau asli. Tetapi, walaupun begitu, selama perjalanan ke mana-mana waktu itu, Umar Said selalu dibuntuti oleh perasaan tidak aman. Sebab, menggunakan paspor yang tidak sah adalah pelanggaran hukum.

Tak kalah perihnya hidup sebagai eksil yang seolah tanpa harapan di negeri orang, diceritakan Farida Ishaja kepada penulis pekan pertama Januari 2023: “*Ada seorang eksil yang*

pada suatu hari cerita pada saya bahwa dia sedang membangun sebuah monumen. Saya datang ke rumahnya di Amsterdam untuk melihat. Maasyaa Allah, Si bapak sedang mengumpulkan bahan-bahan tentang para eksil atau orang terhalang pulang yang meninggal dunia yang berbentuk: berita duka, lelayu, foto-foto, riwayat hidup dan lain-lain. Ditatanya di map-map seperti album”. (Dalam rentang waktu lebih 50 tahun kalau dihitung sampai waktu beliau berpulang ke Rahmatullah.) Sesungguhnya, Bapak itu sudah meninggalkan sebuah monumen. Kenang-kenangan dari teman-teman senasibnya yang terhalang pulang. Ratusan jiwa. Bapak itu namanya Sarmadji, telah meninggal dunia di Amsterdam, pada 17 Desember 2022 dalam usia 90 tahun. Alarhum dikirim oleh Pemerintah Soekarno untuk mempelajari ilmu pendidikan di luar sekolah di RRT pada 1960-an.

Ternyata, eksil tidak hanya mereka yang tengah studi, melakukan perjalanan karena profesi, tapi sejumlah pejabat negara, tepatnya duta besar. BBC Indonesia edisi 26 Juni 2023 dalam salah satu tulisan panjang berjudul “Eksil korban peristiwa 1965: Apa kaitan mereka dengan label PKI sehingga tidak diakui sebagai WNI?” mengungkap kisah Dubes Sukrisno, sosok yang dikenal dekat dengan Presiden Sukarno. Dia ditugaskan mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rumania dan menjadi duta besar pertama di negara Eropa timur itu.

Menyusul penempatan di Bukares, Sukrisno lantas diperintahkan membangun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam dan sekaligus ditunjuk menjadi duta besarnya di Hanoi pada tahun 1965. Dari Vietnam, Sukrisno mengungsikan istri, Siti Aminah, bersama tiga anak mereka ke negara yang paling dekat, China (dulu dikenal dengan nama Tiongkok).

Tak berselang lama, Duta Besar Sukrisno meletakkan jabatan karena tidak setuju dengan pembantaian massal. Penguasa baru di Indonesia menyatakan Dubes Sukrisno *persona non grata*. Mantan Duta Besar RI Sukrisno beserta istri dan anak-anak mereka menjadi vluchteling, pengungsi. Pertama kali tiba di Belanda, mereka ditampung di sebuah asrama milik gereja. Mereka belajar bahasa Belanda bersama dengan sesama pengungsi dari Iran dan negara-negara Afrika.



Gambar 6: Sukrisno, Siti Aminah, Siti Krisnowati dan Sungkono beserta anak pertama mereka dalam suatu acara di China, negara yang menampung mereka setelah mengungsi dari Vietnam.

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65387237>

Dalam tulisan itu, BBC melaporkan, Selain Sukrisno, mantan duta besar yang meninggal di pengasingan, di antaranya terdapat Mohamad Ali Chanafiah. Dia ditugaskan sebagai duta besar untuk Sri Lanka di era pemerintahan Presiden Sukarno, dan meninggal dunia di Swedia. Anak Marhaen Hanafi, mantan duta besar di Kuba tutup usia di Prancis. Dengan membaca banyak kisah para eksil yang tersebar di sejumlah negara, sebagian menulis memoar, catatan, dan mengungkapkan perjuangan di tanah pengasingan, dampak Peristiwa G-30 S sangat besar. Yang terberat dirasakan para eksil adalah stigma bahwa mereka pendukung atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Soe Tjen Marching dalam pengantar buku tentang eksil di Jerman mengatakan, stigma ini dilanjutkan oleh kedutaan Indonesia di masa Orba. Banyak mahasiswa yang studi di Eropa diperingatkan supaya tidak bergaul dengan eksil karena mereka itu komunis. Sekarang, stigma ini rasanya sudah agak luntur karena banyak orang lebih tahu tentang eksil.

Lalu, bagaimana dengan tawaran pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan seluasnya bagi eksil untuk pulang ke Indonesia? Tanggapan beragam dikemukakan beberapa eksil yang menggambarkan dua pilihan mereka: tetap tinggal di negara yang menjadi kewarganegaraannya dan keinginan pulang ke Indonesia, meskipun pilihan terakhir ini juga membuat mereka gundah, mengingat usia yang sudah tua dan kondisi Indonesia yang mereka tidak mengetahuinya secara persis. Namun dua pilihan itu tidak mengurangi pengakuan, tekad dan semangat mereka sebagai orang Indonesia. Artinya, di mana pun mereka berada, hati mereka tetap Indonesia.

Pilihan yang sangat jelas yakni ingin pulang dan menjadi WNI dikemukakan oleh eksil bernama Sudaryanto dari Rusia. Di acara *Kick Off* Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Indonesia yang digelar di Pidie, Aceh, yang disiarkan

di kanal *YouTube* Kemenko Polhukam, Selasa (27/6/2023) itu Ia bercerita di hadapan Presiden Jokowi. Sudaryanto bercerita awalnya ia dikirim oleh Departemen Koperasi dan Transmigrasi untuk belajar sebagai mahasiswa di Institut Koperasi Moskow -sekarang bernama Universitas Koperasi Rusia- pada tahun 1964. Karena tak bisa pulang lagi ke Indonesia dari tugas belajar di Rusia usai meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) Tahun 1965-1966 silam. Sudaryanto tak berhasil melalui tahapan *screening* tersebut. Ia mengatakan proses *screening* itu ada poin harus mengutuk Presiden pertama RI Sukarno sebagai dalang di balik G30S

Sudaryanto yang kini berusia 81 tahun, sempat berprofesi sebagai dosen hingga dekan di Universitas Koperasi Rusia. Kini, Sudaryanto sudah pensiun dari profesinya tersebut. Ia menetap di Rusia hingga memiliki tiga orang cucu. Dia mengaku bahwa pemulihan statusnya sebagai WNI sudah direncanakan tetapi ia masih perlu meyakinkan keluarganya di Rusia, termasuk tiga orang cucunya

Sebaliknya, eksil lainnya yang juga hadir di acara di Aceh ini, Jaroni Soerjomartono yang kini menetap dan sebagai warga negara Cekoslowakia (kini Republik Ceko, red.) juga menceritakan kisahnya. Ia mendapat beasiswa pemerintah untuk belajar, tetapi paspornya bersama 16 mahasiswa Indonesia lainnya dicabut setelah menolak menandatangani persetujuan atas pemerintahan yang baru selepas Peristiwa 1965-1966. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627135049-12-967106/eksil-1965-curhat-ke-jokowi-ogah-kutuk-bung-karno-jadi-warga-rusia>)

Jaroni Soerjomartono yang kini berusia 80 tahun menyatakan belum memiliki rencana lebih lanjut mengenai pemulihan status WNI-nya. Ia bahkan mengaku tidak menyangka bahwa ia akan mendapat tawaran dan menerima pemulihan hak semasa hidupnya. "Situasi yang semacam ini buat saya kejutan. Saya tidak mengira bahwa bisa terjadi langkah-langkah (pemulihan hak) di dalam (semasa) saya masih hidup," kata Jaroni (<https://voi.id/berita/290326/jokowi-tawari-2-eksil-korban-peristiwa-1965-1966-kembali-jadi-wni>)

Satu lagi eksil asal Bogor yang sejak kecil mengikuti tugas ayahnya sebagai diplomat yaitu Waruno Mahdi. Marten Aleida melukiskan dengan baik sosok ahli kimia yang pernah bekerja di lembaga penelitian Jerman yang terpendang: Max Planck Gesellschaft. Dia juga dikenal sebagai ahli bahasa dan kebudayaan rumpun Melayu. Kepintarannya membawanya berkunjung ke Indonesia. Dia seorang polyglot, tidak punya hambatan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Rusia. Dia juga memahami bacaan dalam rumpun bahasa Slavia, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia, Vietnam, dan Mandarin.

Mula-mula ditulis di Harian Kompas, 10 September 2016, Marten Aleida kemudian menyalin tulisan itu dalam buku kumpulan 19 eksil, *Tanah Air Yang Hilang* dengan judul yang sama “Waruno Mahdi: Saya Masih Bisa Hidup” di halaman 33-48. “Saya datang dari kota kecil Voronezh di selatan Moskwa, tempat saya dibuang 8 tahun. Saya orang Indonesia satu-satunya di sana. Setelah lima tahun lulus di bidang kimia, terjadi peristiwa 1965. Ceritanya panjang, mengapa saya tak bisa pulang. Mereka – kelompok mahasiswa dan orang-orang politik Indonesia pro-Moskwa – tidak senang dengan kelompok kami karena tidak mau masuk kelompok mereka. Kami tidak mau masuk, takut kepribadian kami hilang.”

Mengenai Indonesia, dilema batin Waruno tergambar dalam pernyataan ini dan banyak eksil yang mengalamihai sama, lalu memutuskan hal yang serupa. “Baru dua kali. Sesudah saya menjadi warganegara Jerman, tahun 2000, saya pulang. Saya tadinya berharap bisa kembali menjadi warga Indonesia. Ketika utusan Gus Dur, Yusril Ihza Mahendra, menemui orang-orang yang dikatakan klayaban, saya juga datang ke kedutaan Indonesia di Belanda. Namun, karena tak ada kelanjutan, saya putuskan jadi warga negara Jerman.”

4. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai persoalan atau lebih tepatnya dilema yang dihadapi para eksil, baik yang sudah meninggal maupun yang hidup dan tinggal tersebar di sejumlah negara, kita dapat merasakan betapa kehidupan mereka penuh dengan penderitaan dan perjuangan untuk bertahan dan hasrat yang besar untuk tetap berharap suatu saat ada perubahan, terutama kebijakan politik yang mengakui dan mengakomodasi keinginan mereka. Sebab mereka tidak terlibat dengan Peristiwa G30S yang terjadi akhir September 1965 di Indonesia dan mereka sedang menempuh studi atau melakukan sesuatu sesuai pekerjaan dan profesi mereka.

Dari perjalanan panjang puluhan tahun para eksil yang terekam dalam buku, artikel, film Dokumenter, dan riset yang belum dipublikasikan, tergambar betapa mereka seperti gambaran yang dilontarkan Presiden Gus Dur, yaitu orang-orang *klayaban* orang yang hidup ke sana-ke mari tanpa arah dan hancur harapan mereka untuk mengabdikan pada negeri dari ilmu yang mereka gali di negeri yang sudah maju.

Profesor David Hill menggarisbawahi bahwa para eksil merupakan wujud dari suatu kehilangan bagi bangsa Indonesia mengingat mereka dikirim ke luar negeri untuk mencari ilmu di berbagai bidang. "Di dalamnya ada orang yang betul-betul top dalam profesi mereka, yang sudah puluhan tahun mau kembali untuk berbakti kepada masyarakat tapi ditolak oleh

pemerintahnya. Sangat, sangat disesalkan," katanya. (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65387237>)

Namun demikian, gambaran tentang dilema eksil yang penulis uraikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan : Pertama, stigma sebagai orang komunis atau pendukung G30 S/PKI merupakan pukulan berat yang dihadapi para eksil, hanya karena mereka tidak mau menuliskan atau mengakui pemerintahan baru setelah huru-hara politik itu dalam pemeriksaan di KBRI tempat mereka berada dan kemudian paspor mereka dicabut.

Kedua, perubahan politik di Tanah Air yakni tumbanganya kekuasaan Orde Baru karena dipicu gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada Mei 1998 membawa angin segar dan bahkan ketika Presiden Gus Dur memerintah, mereka ditawarkan untuk kembali ke Indonesia. Untuk ini Gus Dur mengirim utusan khusus yaitu Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sayangnya upaya ini tidak berkelanjutan. Namun demikian, mulai saat itu kebebasan para eksil untuk mengunjungi Indonesia terbuka lebar tanpa dihantui rasa takut.

Ketika, ketika Peristiwa G30 S/PKI sudah berlangsung lebih setengah abad, dan usia para eksil rata-rata diatas 70 tahun bahkan ada yang di atas 80 tahun, angin segar kembali berembus dari Istana Negara. Presiden Jokowi meluncurkan apa yang disebut Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Di Tanah Air pada 27 Juni 2023 yang memasukkan perlakuan terhadap korban G30 S, termasuk para eksil adalah kejahatan HAM berat. Oleh karena itu Pemerintah melakukan upaya non yudisial agar masalah HAM berat ini dapat diselesaikan dengan baik di akhir kekuasaan keduanya. Khusus untuk para eksil, Pemerintah menawarkan mereka kembali dan mengurus semua hal terkait dengan itu

Keempat, respon para eksil terhadap kebijakan baru Presiden Jokowi ini umumnya disambut gembira para eksil. Ada yang dengan tegas menyatakan ingin pulang dan meyakinkan sanak keluarganya di luar negeri untuk kembabli ke Tanah Air. Sebaliknya banyak yang menolak dengan alasan yang jelas, sudah tua dan mereka sudah mempunyai kehidupan di negeri orang.

5. Daftar Pustaka

Journal article

Aleida, Marten (2017). *Tanah Air yang Hilang: Wawancara dengan Orang-orang "Klayaban" di Eropa*. Penerbit Buku Kompas

Marching Soe Tjen (2023) *Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman*, EA Books.

Said, Umar (2004), *Perjalanan Hidup Saya yang diterbitkan* .Yayasan Pancur Siwah

Wahyudi Akmaliah. (2015) *Indonesia yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 dan Kemunculan Eksil Indonesia 65*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 1 Tahun 2015, 65-76

Internet:

file:///C:/Users/08/Downloads/122-Article%20Text-235-1-10-20150921%20(6).pdf
<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/19142491/kepada-jokowi-dua-eksil-peristiwa-1965-ceritakan-pengalaman-saat-tak-bisa>

<https://umarsaid.gitlab.io/biography/>
(<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65387237>)

<https://researchportal.murdoch.edu.au/esploro/outputs/conferencePaper/Knowing-Indonesia-from-Afar-Indonesian-Exiles/991005542804307891#file-0>

<https://hilmarfarid.id/pengasingan-dalam-politik-kolonial/>)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230111104824-12-898847/daftar-12-kasus-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-jokowi>

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/luncurkan-program-pemulihan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-presiden-untuk-pulihkan-luka-bangsa/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627135049-12-967106/eksil-1965-curhat-ke-jokowi-ogah-kutuk-bung-karno-jadi-warga-rusia>

<https://voi.id/berita/290326/jokowi-tawari-2-eksil-korban-peristiwa-1965-1966-kembali-jadi-wni>)

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/649584449d992/136-korban-ham-berat-masih-berada-di-luar-negeri-mayoritas-eksil-1965>

<http://lipi.go.id/berita/gus-dur-pahlawan-ham/642>)

<https://puslapdik.kemdikbud.go.id/sejarah-beasiswa-di-indonesia-masa-indonesia-merdeka-sekarang>

<https://infografis.okezone.com/detail/775560/2-program-beasiswa-era-presiden-soekarno>

Wawancara:

Farida Ishaja 3 Januari 2023

Nani Pardede, 25 November 2022

Umar Said, Tahun 2004